

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Administrasi sistem informasi dan kompetensi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa penerapan administrasi sistem informasi yang tertib dan terstruktur mampu meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat proses pelayanan dalam organisasi pemerintahan. Sistem informasi yang dikelola dengan baik membantu pegawai dalam mengakses data secara akurat dan tepat waktu, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas kinerja. Selain itu, kompetensi pegawai yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai cenderung mampu menyelesaikan tugas secara efektif, tepat waktu, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi.

Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional (Verawaty, 2023).

Sejalan dengan upaya reformasi birokrasi tersebut, berdasarkan penelitian terdahulu, peran sistem informasi menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan organisasi dan kesejahteraan pegawai. Melalui adanya perkembangan tersebut, kinerja dapat lebih mudah dan akses informasi dapat diperoleh secara aktual terutama pada penanganan sistem kepegawaian (Anggreani & Wilandari, 2023).

Dalam mendukung efektivitas tersebut, kualitas suatu sistem informasi memfokuskan pada kinerja komponen sistem informasi yaitu seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, basis data, jaringan, komunikasi, data, aktivitas, jaringan dan teknologi dari sistem informasi dalam menghasilkan informasi untuk para manajer (Natasya & Fitriah, 2024). Dengan demikian, kualitas sistem informasi menjadi faktor penting dalam menunjang kinerja organisasi.

Jika administrasi diterapkan secara tepat, maka setiap pegawai akan memerlukan akses ke sistem informasi yang cepat dan akurat untuk menjalankan tugas sehari-hari dengan efisien (Aprilia et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan administrasi sistem informasi yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai di lingkungan pemerintahan.

B. Uraian Teori

1. Administrasi Sistem Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak perubahan di berbagai bidang, baik itu corporate maupun lembaga yang bergerak

di bidang jasa. Teknologi informasi dan komunikasi merubah aktivitas menjadi cepat, akurat, dan fleksibel. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah membawa fenomena pergeseran orientasi kebutuhan pengguna akan informasi berbasis teknologi informasi. Untuk itu perusahaan sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa informasi perlu melakukan inovasi berbasis kebutuhan pengguna informasi (Fayadh, 2025).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, administrasi sistem informasi menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Administrasi sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama dan menghasilkan suatu informasi guna memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok (Jati Prabawa et al., 2025).

Dengan adanya sistem informasi yang dikelola melalui administrasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. Efektifnya kerja para pegawai dapat menjadikan organisasi semakin tangguh dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Dengan adanya sistem informasi, maka suatu organisasi semakin mampu berperan dengan tingkat efektivitas yang tinggi serta dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi untuk unit-unit fungsional organisasi pemerintah.

Selain itu, dalam menetapkan berbagai kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan, baik pada tingkat konseptual maupun pada tingkat operasional, diperlukan berbagai data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat

guna mendukung proses pengambilan keputusan sejalan dengan tingkat perkembangan yang semakin maju (Reza Annas Tasya Syam et al., 2024).

2. Kompetensi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, sumber daya manusia dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan secara proaktif di dalam organisasi (Syahrial Mahyudin & Sandra Oktaviana Pinaraswati, 2024).

Salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam organisasi adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan. Kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan kemudian berkembang menjadi sifat pribadi yang mendorong seseorang untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Dengan demikian, kompetensi menjadi faktor yang menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan secara optimal serta menentukan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan (Toja et al., 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, sebuah perusahaan atau organisasi akan lebih berkembang dan memperoleh keuntungan apabila memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang unggul dapat meningkatkan pengetahuan serta

kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, kompetensi perlu didukung oleh organisasi agar dapat membentuk kemampuan individu sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk terus berkembang (D. A. Putra & Hikmah, 2023).

3. Kinerja Pegawai

Definisi kinerja pegawai adalah hasil yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugas yang meliputi dimensi kuantitas kerja, kualitas kerja, kerja sama, tingkat kehadiran, dan ketepatan waktu (Dwiryani & Latunreng, 2025).

Dengan demikian, kinerja pegawai menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi.

Kinerja yang baik dapat mendukung instansi berjalan sesuai dengan harapan, visi, misi, dan tujuan yang telah direncanakan. Apabila tujuan instansi tersebut dapat selalu tercapai, maka hal ini akan memberikan dampak positif terhadap citra instansi di mata masyarakat (Arya et al., 2024).

Namun dalam praktiknya, kinerja pegawai tidak selalu berjalan secara optimal. Dari hasil observasi dan pengamatan di awal dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerja pegawai. Salah satunya adalah masih rendahnya motivasi kerja pegawai, dimana semangat pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya kinerja pegawai yang terlihat dari sering terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan (Wel Hendra et al., 2024).

4. Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Barang dan jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi atau instansi (Ainun & Castellani, 2024).

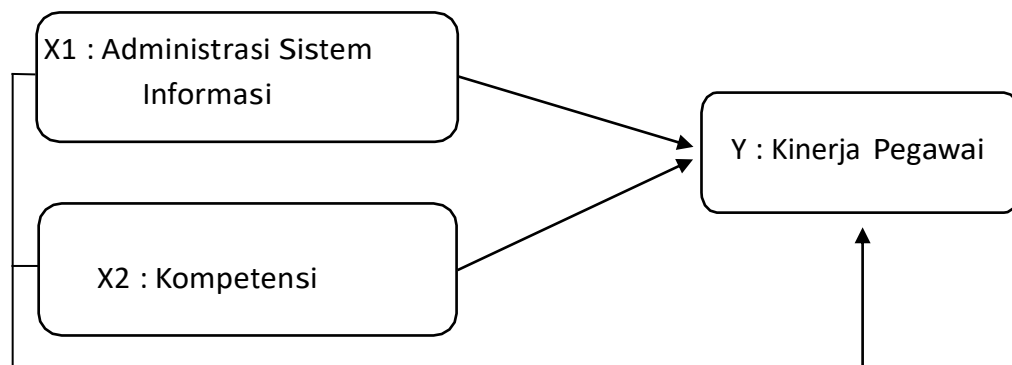
Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan sering menjadi area yang rentan terhadap berbagai permasalahan. Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali menjadi area rawan korupsi, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat yang masih menghadapi masalah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mulai mengimplementasikan E-Procurement, yaitu sistem pengadaan secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi (Jaya Ariadi et al., 2024).

Sejalan dengan penerapan sistem elektronik tersebut, pengadaan barang dan jasa kini juga didukung oleh berbagai sistem informasi digital yang mempermudah proses administrasi dan transaksi. Sistem ini menyediakan layanan daftar penyedia barang dan jasa, pemesanan, pembayaran, serta pelaporan secara elektronik dalam rangka penggunaan uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran instansi pemerintah. Oleh karena itu, marketplace pemerintah dikembangkan tidak hanya sebagai aplikasi belanja daring bagi satuan kerja

instansi pemerintah, tetapi juga sebagai wadah yang mampu memenuhi konsep-konsep dasar pembayaran dan pengelolaan transaksi secara lebih efektif (Lestariyanto & As'ad, 2024).

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian kuantitatif ini mengenai pengaruh administrasi sistem informasi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di kantor bupati labuhanbatu.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Parsial

H₁: Administrasi sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu.

Alasan: Administrasi sistem informasi yang baik memudahkan pegawai dalam mengelola data dan informasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien.

H₂: Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu.

Alasan: Pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang baik akan lebih mampu menyelesaikan tugas dengan efektif sehingga kinerjanya meningkat.

2. Hipotesis Simultan

H₃: Administrasi sistem informasi dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu.

Alasan: Administrasi sistem informasi yang baik dan kompetensi pegawai yang memadai dapat mendukung kelancaran pekerjaan sehingga kinerja pegawai menjadi lebih optimal.